

Reformasi kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan bagian dari pembangunan bidang kesejahteraan sosial (Dalam Wantu, 2014).

Mengacu pada strategi kebijakan terhadap pengurangan angka kemiskinan di negara berkembang termasuk Indonesia dan lebih khusus lagi di provinsi Gorontalo sangat terlihat bahwa sulit terjadi penurunan angka kemiskinan yang saat ini yakni tahun 2016 masih berkisar pada angka 17,72 persen yang dinilai masih cukup tinggi dengan jumlah penduduk 1.150.765 jiwa. Dengan melihat angka kemiskinan ini, maka ada beberapa kendala dalam penanganan untuk mengurangi masalah kemiskinan yang diperankan oleh aktor pengambil kebijakan pemerintah daerah provinsi Gorontalo, yang dinilai kurang berkembang dalam pelaksanaannya yakni melihat kemiskinan hanya semata-mata adalah sebuah fenomena sosial dalam dimensi ekonomi semata-mata.

Pemerintah daerah melalui RPMJ berusaha mengeluarkan beberapa kebijakan dan program untuk memperbaiki masalah sosial yang menjadi perhatian pemerintah yaitu bidang yaitu sektor ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan dan infrastruktur. Keempat program tersebut pada intinya di arahkan bagaimana kepentingan masyarakat bisa menikmati adanya pelayanan dan sekaligus mengurangi ketimpangan sebagai pemicu kemiskinan. Karenanya salah satu kebijakan untuk memperbaiki kehidupan sosial masyarakat miskin tersebut antara lain melalui implementasi kebijakan melalui upaya pembangunan pertanian yakni mendorong kelompok masyarakat pedesaan untuk mengeksplorasi lahan pertanian yang belum digunakan dengan baik.

Kebijakan ini diperuntukan salah satu sisi untuk perencanaan pembangunan pertanian digerakkan secara efisien dan efektif untuk mengejar ketahanan pangan dan harga diri terutama bagi sumber daya petani yang selalu menyediakan sumber pangan bagi manusia, antara lain melalui agropolitan jagung dapat memberi dampak pada kemampuan untuk menyediakan pangan. Di lain sisi Persediaan pangan jagung tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat Gorontalo, namun pula menjadi modal dasar bagi upaya membangun daerah supaya mengalami kemajuan baik dari segi pertumbuhan ekonomi, dan indikator untuk mengurangi angka kemiskinan. Arah kebijakan pembangunan daerah provinsi Gorontalo secara keseluruhan bertujuan untuk mencapai akselerasi pada pencapaian kemakmuran masyarakatnya, dan sekaligus bisa mengurangi angka kemiskinan dan sebagai solusi untuk meminimalisir angka bagi pengangguran.

Akan tetapi untuk mengejar hal itu berbagai tentu kendala masih tetap menghadap terhadap pencapaian tujuan tersebut yaitu: (1). Minimnya pemerintah daerah menyediakan sumber dan bagi modal pembangunan daerah; (2). Struktural, ekonomi masyarakat terutama di daerah-daerah pedesaan maupun pedalaman masih bergelut dengan kemiskinan, dan hal dapat dilihat pada jumlah angka kemiskinan provinsi Gorontalo sangat tinggi yakni tahun 2015 pada Maret berkisar 18,32 dan bulan September berjumlah 18,16 % dan 2016 berkisar 17,72%.

METODE PENELITIAN

Riset ini dilaksanakan pada Tahun 2015 dengan menggunakan metode kualitatif, dimana pendekatannya ingin memahami suatu fenomena kebijakan dan kelembagaan ekonomi sebagai pilar pembangunan pertanian yang akan meretas kemiskinan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan secara integrative dengan melihat data-data yang relevan dan sempurna dari berbagai sumber yaitu: Pertama, pencarian data sebagai sumber data utama adalah pemerintah provinsi Gorontalo yang menangani masalah kemiskinan. Sumber data yakni para informan yang dipilih secara purposive pada subyek penelitian yang dianggap menguasai permasalahan yang diteliti adalah pejabat daerah, akademisi, masyarakat miskin sebagai informan. Kedua, Berbagai literatur dan data sekunder, atau perhal dokumen yang dapat memberi petunjuk untuk mendalami masalah tentang gambaran kemiskinan secara keseluruhan. Karena itu dalam menganalisa data digunakan model interaktif (Miles dan Huberman, 1992) yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Angkatan Kerja Dan Pengangguran Sebagai Pemicu Kemiskinan

Jumlah penduduk yang berpendidikan sebagai sumber daya manusia yang hakiki, sesungguhnya dinilai cukup berpotensi sebagai pemberi kontribusi terhadap perkembangan daerah dan sekaligus merupakan modal dalam menggerakkan pembangunan daerah dalam meraih pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi target pelaksanaan desentralisasi di provinsi Gorontalo dimana kewajiban pemerintah daerah adalah memajukan perekonomian daerah yang nantinya memberikan nilai positif bagi pelayanan publik (*public service*) yang semuanya bermuara pada bagaimana memajukan tingkat kesejahteraan bagi masyarakat Gorontalo yang tergolong masih tertinggal dengan daerah lain di Indonesia, terutama bagaimana mengurangi masalah kemiskinan.

Pada hal hakekat dalam membangun otonomi daerah maupun desentralisasi menurut Arsyad (1999) bahwa dalam pelaksanaan tentang upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama –sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Pemerintah bersama sector swasta bersama menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (Krisna Atmaja Karang, 2003).

Pelaksanaan pembangunan daerah sangat membutuhkan angka modal para pekerja yang siap pakai yang berasal dari berbagai lulusan pendidikan tersebut dapat dikatakan sebagai modal sosial dalam mengembangkan pertumbuhan pembangunan yang ada di daerah tersebut. Untuk itu bila dilihat berdasarkan angkatan kerja sebagai modal dasar pembangunan yang nantinya dilatih menjadi sumberdaya pembangunan, maka muncul dengan jelas berapa besar kekuatan para angkatan kerja yang terlihat berdasarkan data di bawah ini:

Tabel 1: Jumlah Pencari kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan di provinsi Gorontalo pada tahun 2014

No	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD ke bawah	62	29	91
2	SLTP	190	116	306
3	SLTA	5.465	7.637	13.102
4	Diploma I dan II	582	1.238	1.820
5	Diploma III	679	4.111	4.790
6	Universitas	3.027	4.154	7.181
	Jumlah Total	10.005	17.285	27.290

Berdasarkan gambaran data penduduk dan angkatan kerja sesungguhnya sebagai sesuatu yang dapat memberikan petunjuk yang dapat dijadikan sebagai modal terhadap pertumbuhan ekonomi seperti dijelaskan di atas. Akan tetapi bila tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai dasar dari pembangunan daerah tidak tercapai dan tentu berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan dinilai sebagai kegagalan terhadap penerapan otonomi daerah. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai salah satu parameter kegagalannya antara lain adalah terletak pada karakteristik penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan kuantitas pengangguran di daerah ini. Ketidakberhasilan ini tentu sangat kontra produktif dengan apa yang dikatakan oleh Todaro (2000) yang menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan atau perubahan total suatu masyarakat/penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan menuju kondisi kehidupan yang lebih baik. Lebih lanjut dikatakan bahwa

sumber pertumbuhan ekonomi dapat terdiri dari kenaikan kualitas dan jumlah tenaga kerja, penambahan modal melalui tabungan dan investasi serta adanya penyempurnaan teknologi.

Berdasarkan gambaran teoritis di atas, maka secara empiris dapat dikatakan bahwa sesungguhnya suberdaya tenaga kerja berdasarkan pada parameter indikator ketenagakerjaan dapat dinarasikan berdasarkan data yang dikutip Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo yang memunculkan tentang Potret Capaian Beberapa Indikator Makro Pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2011-2015. Untuk lebih jelas data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2: Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan, Agustus 2011 & Agustus 2015

Lapangan Usaha	Agustus 2011				Agustus 2015			
	Pekerjaan Tidak Penuh (< 35 Jam)		Pekerja Penuh (35+)		Pekerja Tidak Penuh (<35 Jam)		Pekerja Penuh (35+)	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perburuan	76.392	44.741	88.741	31.64	74.909	48.65	96.195	28.32
Pertambangan	2.362	1.39	12.533	4.47	2.681	1.74	11.649	3.43
Industri	14.278	8.38	29.021	10.35	12.724	8.26	22.960	6.76
Listrik, Gas, dan Air Minum	-	0.00	182	0.06	384	0.25	574	0.17
Konstruksi	5.837	3.43	22.852	8.15	6.887	.47	22.599	6.65
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	23.07	13.53	43.515	15.52	22.661	14.72	74.839	22.03
Transportasi Pergudangan	6.161	3.62	28.261	10.08	4.957	3.22	29.362	8.64
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Usaha Persewaan	1.323	0.78	5.069	1.81	1.484	0.96	5.963	1.76
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	40.929	24.03	50.264	17.92	27.282	17.72	75.577	22.25
Total	170.329	100.00	280.438	100.00	153.969	100.00	339.718	100.00

Sumber: Badan Pusat statistik Provinsi Gorontalo: Potret Capaian beberapa Indikator Makro Pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2011-2015

Dengan melihat data dan argumentasi di atas yang berkaitan dengan masalah angkatan kerja dan pengangguran yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap masalah tingkat kemiskinan daerah, maka pemerintah daerah berusaha keras untuk mendorong upaya penyelesaian masalah tersebut. Dimensi penanganannya antara lain melalui sasaran prioritas pembangunan tahun 2017 di arahkan pada tema yakni terus menerus mendorong peningkatan sumberdaya manusia dan memacu pembangunan infrastruktur daerah, untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang berkeadilan. Tentu dengan tema ini salah satu parameter secara intitusional yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Gorontalo adalah melaksanakan kebijakan yang diletakkan pada unsur strategis yang ditujukan pada bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan dengan sasaran prioritas antara lain (1). Peningkatan kerjasama investasi, (2). Peningkatan realisasi investasi baik PMDN, PMA dan Swasta Murni, (3). Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah, (4). Mengembangkan Pariwisata Daerah, (5). Mengembangkan IKM, UMKM dan Koperasi, (6). Menurunkan angka pengangguran terbuka, (7). Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Dari tujuh sasaran prioritas, maka penanganan masalah kemiskinan disamping lima sasaran memberikan kontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan juga adalah dua prioritas yakni usaha menurunkan angka pengangguran terbuka, juga upaya lain dalam peningkatan keterampilan dan produktivitas bagi tenaga kerja supaya mereka mampu meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu jalan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah, maka sangat perlu pengembangan

infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah, salah satunya memperkuat ekonomi desa. Mengapa hal ini sangat dibutuhkan, karena sebagian besar kemiskinan ada di daerah pedesaan. Dengan melihat berbagai sasaran yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi Gorontalo dalam melakukan penanggulangan masalah sosial, maka salah satu caranya adalah bagaimana pemerintah daerah melakukan political will dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada penyelesaian masalah kemiskinan antara lain pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui pola bantuan sosial maupun ekonomi (lihat Sidiki, 2016) .

Tabel 3: Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin, Persentase **Penduduk** Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Gorontalo, 2009-2015

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin Jumlah	P1	P2	P3
2008	147 154	221,60	24,88	4,59	1,27
2009	162 189	224,60	25,01	4,59	1,27
2010	171 371	209,90	23,19	4,14	1,00
2011	187 215	198,42	18,75	3,72	1,00
2012	203 907	186,44	17,33	2,92	0,71
2013	221 457	191,44	17,51	3,18	0,90
2014	243 547	194,17	17,44	3,29	0,90
2015	263 652	206,84	18,32	3,97	1,24

Sumber: Badan Pusat statistik Provinsi Gorontalo 2016

Membangkitkan Kembali Arah Kebijakan Pemerintah Melalui Sektor Pertanian Demi Mengurangi Angka kemiskinan

Pengabaian potensi agraris melalui pembangunan pertanian tentu mengakibatkan konsekwensi bagi kepentingan masyarakat termasuk petani di daerah pedesaan, apalagi pembangunan pertanian tidak lagi menjadi prioritas yang utama dan tergantikan dengan prioritas lain di luar sektor pertanian jagung. Pada hal pemerintah telah berusaha sekuat tenaga untuk mendorong sektor ini dengan kebijakan yang bersifat sustainable (berkelanjutan), sehingga ketersediaan pangan yang berasal dari komoditas jagung selalu dihadirkan oleh masyarakat petani. Bilamana ketidakseriusan pemerintah daerah yang tidak melalui dukungan political will yang berorientasi pada politik pertanian dan hanya dilakukan dengan tentative (coba-coba) dan tidak serius, maka ini akan menjadi doomsday (hari kiamat) bagi kepentingan masyarakat dan industri yang sangat tergantung pada sumberdaya alam yang bersumber dari dimensi pertanian agropolitan jagung. Untuk lebih jelas melihat potensi yang sangat merugikan bagi pembangunan pertanian dengan berorientasi keinginan merubah kebijakan yang pada awalnya diperuntukan bagi kepentingan eksploitasi dari sumberdaya pertanian yang beralih pada kebijakan lain, maka secara otomatis hal itu memutus rantai kebutuhan dasar manusia dan modal dasar pembangunan.

Berdasarkan argumen ini bisa dipastikan pengabaian atau pengalihan kebijakan terhadap sumberdaya pertanian dari salah satu keragaman ketahanan pangan yakni agropolitan jagung di Gorontalo tidak hanya akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kebutuhan dasar dan pembangunan daerah, namun pula sumberdaya petani. Pembiaran atau ketidakseriusan terhadap pembangunan agropolitan jagung sebagai salah satu fase daerah ini memasuki perjudian besar dalam hal kebijakan dan bisa dipastikan membawa kerugian besar bagi masyarakat termasuk para petani. Karena secara empiris mereka yang terabaikan dalam pertarungan dari arena kepentingan ini sangat membahayakan keberlangsungan terhadap kehidupan petani dimana salah satu indikator yang muncul adalah menurunnya kesejahteraan mereka yang diikuti oleh naiknya angka kemiskinan yang sebagian besar ada dikatong-kantong pertanian yang ada di desa. Bahkan lambat laun dapat dipastikan para petani akan menjadi generasi yang hilang pada sektor pertanian yang tentu

menambah daftar pengangguran dan kemiskinan di desa. Apalagi saat ini mereka dengan ketidakmampuan masalah manajemen maupun pengetahuan dan teknologi secara paksa harus menyeret kondisi mereka menjadi petani tradisonil (peasant) yang secara terus menerus sebagai petani yang penghasilannya hanya sedikit bahkan tidak cukup membiayai keluarga dengan kehidupan yang layak, karenanya status yang diemban mereka bukan petani modern (Farmer).

Salah satu cara untuk keluar dari jaring-jaring kapitalis yang menyesatkan adalah merubah kebijakan pembangunan yang berorientasi kearifan lokal maupun komunitas daerah dengan mengedepankan pembangunan daerah maupun pertanian yang bernilai populis (kerayatan). Hal ini sesuai dengan konsep kebijakan pembangunan daerah provinsi Gorontalo yang memprioritaskan ekonomi kerakyatan yang dapat dipastikan roh dan jantung perekonomiannya ada di desa dengan mayoritas sumberdaya pertaniannya termasuk komoditas tanaman jagung. Solusi yang terbaik adalah pertama, merubah kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada pembangunan yang sesuai dengan nilai Pancasila bukan dengan model pembangunan kapitalis malu-malu (pseudo capitalism) di tingkat lokal yakni dikatakan kapitalis bukan tetapi dalam prakteknya sesungguhnya menerapkan nilai-nilai kapitalis. Kedua melakukan reformasi kelembagaan yang berorientasi pembangunan pertanian sebagai sikap dan semangat masyarakat daerah yang lebih peka pada dimensi moral sebagai panglima yaitu kewenangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah termasuk pembangunan pertanian harus dikembalikan kepada kepentingan rakyat dalam hal ini tidak terkecuali komunitas petani lokal. Dan sebaliknya pemerintah daerah dalam hal ini birokrasi sebagai organ mengatur alur kepentingan politik pemerintah daerah yang pro rakyat memiliki tanggungjawab dalam pembangunan pertanian sebagai sandaran bagi hajat hidup orang banyak. Pembangunan pertanian yang berbasis pada kepentingan komunitas dan pro petani sebagai salah satu solusi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang berdimensi pada pencapaian terhadap penurunan angka pengangguran maupun kemiskinan. Salah satu prasyarat untuk membangkitkan animo masyarakat petani untuk turun pada lahan pertanian adalah melakukan reformasi terhadap kelembagaan termasuk komunitas petani yang ada di desa.

Berbagai aturan normatif telah dibuat baik berdasarkan payung hukum nasional maupun lokal sebagaimana secara lengkap digambarkan pada uraian sebelumnya tidak lain untuk melakukan perlindungan terhadap pembangunan pertanian maupun masyarakat petani Gorontalo agar supaya eksis, dapat bersaing secara global dan terbebas dari kemiskinan. Upaya untuk menyusun semua kebijakan ini baik bersifat struktur kelembagaan maupun penataan secara politis yang berkaitan dengan kehidupan yang secara kondusif bagi aktor yang terlibat di dalamnya untuk mengurus masalah pertanian yang berbasis agropolitan jagung. Para aktor yang paling menentukan dan berkepentingan mengoperasikan kebijakan tersebut harus berpatron pada arah kebijakan pembangunan provinsi Gorontalo yang berafiliasi pada ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu sendiri sangat identik dengan demokrasi ekonomi dimana kedudukan maupun kedaulatan rakyat terletak pada bidang kehidupan ekonomi. Secara rasional bagaimana konsep demokrasi ekonomi, maka akan dikutip argumentasi Kartasamita (1996) yang menguraikan tentang pengertian demokrasi ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Atau menurut rumusan UUD 1945 bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Warna kerakyatan dalam kehidupan ekonomi tersebut adalah sama dengan cita-cita keadilan dalam kehidupan ekonomi.

Melepaskan Kemiskinan Melalui Kelembagaan Ekonomi Sebagai Pilar Pembangunan Pertanian

Penjelasan tentang hubungan antara arah kebijakan pembangunan yang diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai demokrasi ekonomi dalam ruang lingkup pembangunan pertanian di daerah Gorontalo adalah merupakan argumen yang semakin memperjelas pemberdayaan agropolitan jagung. Hal itu

perlu dibutuhkan sebuah institusi atau kelembagaan secara ekonomi maupun politik yang diwujudkan dengan pendekatan populis yang mengedepankan komunitas petani sebagai sumberdaya pembangunan. Keberhasilan sebuah institusi atau kelembagaan hanya diukur bilamana sistem kelembagaan tersebut bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakat petani yang masih bergelut dengan berbagai keterbatasan dan kemampuannya yang sebagian besar masih tergolong sebagai petani tradisional.

Pada hal secara ekonomi dan politik kondisi petani di Era Globalisasi harus bertarung dan berkompetisi untuk mendapatkan tempat dalam kehidupan ekonomi dan pencarian kehidupan yang lebih maju dan sejahtera, bebas dari kemiskinan. Dukungan pemerintah daerah yang kuat baik politik maupun secara ekonomi yang di arahkan melalui kebijakan sebagai solusi yang terbaik menuju masyarakat daerah yang dicita-citakan tersebut antara lain daerah ini mampu menyelesaikan masalah kemiskinan yang semakin mengurita di daerah ini. Persoalan kemiskinan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah lokus persoalannya berada pada wilayah pedesaan yang sebagian besar mereka hidup di ladang pertanian termasuk tanaman jagung. Sebagai solusi dasar yang dianggap sebagai resep untuk menyelesaikan masalah yang mendasar ini adalah salah satunya kelembagaan harus hadir di tengah-tengah masyarakat petani, jikalau tidak keberadaan hanya konsumsi politik pada saat pesta demokrasi seperti pilkada dan sebagainya. Salah contoh yang menarik adalah terjadinya penurunan hasrat politik maupun ekonomi yang pada awalnya menjadikan pembangunan pertanian yang di arahkan pada agropolitan jagung, saat ini terjadi *policy decline* (kemunduran kebijakan), karena tidak lagi menjadikan kebijakan sebagai primadona dalam pembangunan pertanian.

Salah satu cara untuk mengurangi angka kemiskinan di kalangan para petani adalah peran redistribusi komoditas hasil pertanian yakni jagug berdasarkan pada rasa keadilan dan kewajaran secara ekonomis. Secara otomatis ekonomi kerakyatan dalam iklim demokrasi ekonomi harus melalui keseimbangan antara para pengusaha, pedagang, pengumpul sebagai satu pihak dengan pihak lain yakni para petani secara seimbang dan adil. Iklim seperti dirasakan oleh mereka sebagai keberpihakan kepada kekuatan petani yang kecil dan lemah yang sebagaian besar digolongkan petani tradisional dan secara kuantitas mereka adalah dalam jumlah besar. agar supaya mereka merasa diperlakukan secara psikologis, ekonomis dan politik sebagai kekuatan sumberdaya ekonomi yang ada di desa yang harus diperhitungkan dan diberdayakan. Untuk itu birokrasi daerah sebagai organisasi publik yang didukung oleh keputusan politik para aktor pejabat politik daerah perlu memperkuat sumberdaya petani. Dukungan itu baik secara hukum sebagaimana dijelaskan di atas, politik, maupun ekonomis melalui kebijakan anggaran untuk memberdayakan mereka sebagai petani, sehingga teratasi kesenjangan sosial misalnya pengangguran dan kemiskinan.

Sementara itu hal uang urgen untuk memperkuat dan memberdayakan para petani jagung Gorontalo adalah melalui kepedulian pemerintah daerah terhadap pelayanan-pelayanan publik lain yang selain dua indikator di atas yakni pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Indikator ini seperti dikatakan lebih cenderung menekankan pada implementasi kebijakan pada pembangunan pertanian yang mengarah pada redistribusi jagung yang terjadi pada tingkat mekanisme pasar yang bisa memberikan dampak bagi para petani. Tentu dapat dikatakan bahwa indikator redistribusi yang diperkuat dengan aturan normatif secara kelembagaan dari perspektif ekonomis tersebut harus juga dipayungi oleh perspektif lainnya berupa hak-hak yang mendukung di luar pangan lainnya misalnya perlindungan hak asasi manusia yang diberikan oleh birokrasi pemerintah daerah sebagai organisasi publik. Organ ini memprioritaskan keberpihakan dalam bentuk pemberdayaan terhadap hak-hak petani yang merupakan kelompok masyarakat yang sebagian besar masih tergolong sebagai kelompok yang harus mendapat perhatian pemerintah dalam hal pembebasan dari kemiskinan.

KESIMPULAN

Salah satu parameter untuk mencapai pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan harus melalui pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh perubahan pada struktur ekonomi masyarakat yang seiring dengan peningkatan produksi tenaga kerja.

Muhammad & Wantu: *Meretas Kemiskinan Melalui Kebijakan Dan Kelembagaan Ekonomi Sebagai Pilar*

Kelembagaan ekonomi pada sektor pertanian harus mengedepankan pada upaya memperkuat eksistensi dalam hal hak-hak petani yang merupakan kelompok masyarakat yang masih rentan terhadap masalah sosial ekonomi dan sebagian besar masih tergolong sebagai kelompok yang miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta
- Bergman, Peter dan Glyn Davis, 2004, *The Australian Policy Handbook*, Crows Nest: Allen and Unwin.
- Sidiki, Budiyo, 2016, Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Gorontalo, Forum Konsultasi Publik, Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan pemerataan*, Jakarta, CIDES
- Masoed, Mohtar, 1994, *Politik Birokrasi Dan Pembangunan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Miles dan Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta, UI Press
- Osborne, David dan Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public sector*, reading Addison Wesley, Mass.
- Putu Krisna, I Gede Atmaja Karang, 2003, *Karakteristik Penyerapan Tenaga Kerja Sub Sektor Hotel Dan Restoran Di Kota Denpasar*, Tesis Tidak Dipublikasikan, Magister Ekonomi Pembangunan UGM
- Spiker, Paul, 1995, *Social Policy; Themes and Approaches*, Prentice Hall
- Todaro, M.P, 2000, *Economic Development (7th, ed)* New York Addition Wesley Longman, Inc
- Wantu, Sastro, 2014, *Administrasi Publik Dan Negara gagal Dalam mengatasi Kemiskinan Di Indonesia*, Pidato Dies Natalis Dan Ilmiah Dalam Memperingati Dies Natalis Dan Wisuda Universitas Negeri Gorontalo